



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Tale, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Malenggang, RT.001 RW. 001 Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Hena binti Hade alias Ruhena, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Malenggang, RT.001 RW. 001 Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 214/Pdt.P/2018/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hade, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Galo, saksi nikahnya masing-masing bernama Bandu dan Rahman Bakea dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Riswandi bin Baharuddin.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Tale) dengan Pemohon II (Hena binti Hade alias Ruhena) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984, di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7317052907660001 tanggal 05 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7317055507690002 tanggal 05 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7317051311090017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 09 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3.

B. Saksi:

1. Rahman bin Bahtiar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Galo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hade.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



- Bahwa saksi nikah adalah Bandu dan Rahman Bakea, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.
2. Bandu bin Baco, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Galo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hade.
 - Bahwa saksi nikah adalah Bandu dan Rahman Bakea, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. yang dinikahkan oleh Galo sebagai imam setempat, dengan wali nikah adalah Hade selaku ayah kandung, disaksikan oleh Bandu dan Rahman Bakea, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Riswandi bin Baharuddin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, dan P3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti para Pemohon merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah isteri dan keduanya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Rahman bin Bahtiar dan saksi 2 bernama Bandu bin Baco, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I (Baharuddin bin Tale) dengan Pemohon II (Hena binti Hade) benar telah dinikahkan oleh imam setempat bernama Galo.
- Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hade
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Bandu dan Rahman Bakea dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram.
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984 di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Tale) dengan Pemohon II (Hena binti Hade alias Ruhena) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984, di Malenggang, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib, HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ttd

Drs. M. Thayyib, HP

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 214/Pdt.P/2018/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)